

BAB II

KAJIAN TEORETIK

2.1. Deskripsi Konseptual

2.1.1. Hakikat Pendapatan Keluarga

2.1.1.1. Definisi Pendapatan Keluarga

Untuk mendapatkan gambaran tentang definisi pendapatan keluarga, maka dibawah ini akan dibahas tentang definisi ekonomi keluarga dan pendapatan keluarga.

1. Ekonomi Keluarga

Pengertian ekonomi perlu diuraikan secara umum agar dapat dipahami sebagai dasar untuk penyamaan persepsi dalam penelitian ini. Sebelum merujuk pada pengertian ekonomi keluarga, perlu diketahui terlebih dahulu definisi ekonomi. Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI Online, 2016), istilah “ekonomi” berarti “ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan); pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga; tata kehidupan perekonomian (suatu negara); urusan keuangan rumah tangga”.

Bila dilihat asal katanya di atas, Laily (2013: 1) menyebutkan istilah “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani yaitu kata “*Oikos*” atau “*Oiku*” dan “*Nomos*” yang berarti aturan rumah tangga, dan secara umum mengandung pengertian “usaha manusia”. Dari istilah tersebut, Apridar (2013: 5) secara definitif menjelaskan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari

perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran karena inti permasalahan ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara keinginan (*wants*) manusia yang tidak dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas.

Berdasarkan dari pengertian di atas, terdapat pemahaman yang lebih khusus mengenai ekonomi. Ekonomi dipahami sebagai urusan yang berkaitan dengan keuangan rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara, dan dunia. Namun dapat merujuk pada satu keuangan rumah tangga di keluarga.

Pemahaman dalam pengertian definisi ekonomi keluarga yang sudah dijabarkan sebelumnya perlu diketahui juga definisi keluarga dan rumah tangga. Menurut Bryant and Dick dalam Doriza (2015: 3) membedakan pengertian antara keluarga dan rumah tangga; rumah tangga adalah orang yang tinggal bersama, dengan menggunakan sumber daya kolektif untuk mencapai tujuan, sementara keluarga adalah orang-orang yang memiliki ikatan sosial-biologis melalui pernikahan, kelahiran, atau adopsi, tidak hidup bersama, dan menggunakan sumber daya secara bersama-sama (kolektif) untuk mencapai tujuan bersama. Dengan pemahaman yang lebih khusus, Plato dalam Doriza (2015: 3) mengemukakan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari organisasi sosial.

Dalam definisi ekonomi dan keluarga serta rumah tangga tersebut, munculnya pemahaman yang lebih fokus mengenai definisi ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga yakni merujuk pada permasalahan keuangan yang dihadapi keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Adapun Doriza (2015: 1) menjabarkan

bahwa ekonomi keluarga merupakan salah satu unit kajian ekonomi pada unit paling kecil (keluarga) dari sistem ekonomi yang lebih besar, semisal perusahaan dan Negara.

Berdasarkan beberapa definisi ekonomi keluarga di atas, maka dapat dipahami bahwa ekonomi keluarga adalah kondisi keuangan yang di hadapi keluarga dalam kehidupan sehari-hari mulai dari sumber daya yang dibutuhkan setiap harinya untuk mencapai suatu tujuan hidup bersama.

2. Pendapatan Keluarga

Sebelum merujuk pada pengertian pendapatan keluarga. Perlu diketahui definisi pendapatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online, 2016) asal kata pendapatan berawal dari kata “dapat” berarti “mampu; sanggup; bisa; boleh; mungkin”. Dengan begitu, istilah “pendapatan” berarti “hasil kerja (usaha dan sebagainya); pencarian”.

Pendapatan telah memiliki banyak arti dan beragam pandangan. Salah satunya yang dikemukakan Badan Pusat Statistik Pendapatan, 2013: 1) bahwa pendapatan merupakan imbalan yang diterima baik berbentuk uang maupun barang, yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. BPS menggunakan istilah yang berbeda untuk menggambarkan bayaran yang diterima pekerja. Untuk pekerja yang berstatus buruh, bayaran atas tenaga yang dikeluarkan menggunakan istilah upah. Sementara untuk upah pekerja nonburuh, yaitu mereka yang berusaha sendiri dan pekerja bebas, menggunakan istilah pendapatan.

Berdasarkan definisi di atas, maka perlu diketahui pendapatan keluarga. Namun sebelum mengetahui definisi pendapatan keluarga, perlu dibahas definisi

pendapatan rumah tangga yang merujuk pada pendapatan keluarga. Pendapatan rumah tangga merupakan penghasilan dari keseluruhan anggota rumah tangga yang disumbangkan untuk memenuhi keluarga ataupun perorangan anggota rumah tangga. Pendapatan seseorang dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai kemampuan mereka. Oleh sebab itu dengan berubahnya pendapatan seseorang akan berubah pula besarnya pengeluaran mereka untuk konsumsi suatu barang. Jadi pendapatan merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi konsumsi seseorang atau masyarakat terhadap suatu barang (Sukirno, 2002: 49).

BPS (2014: 54) disisi lain mendefinisikan bahwa pendapatan rumah tangga adalah seluruh penghasilan/ penerimaan berupa uang atau barang dari semua anggota rumah tangga yang diperoleh baik yang berupa upah/gaji, pendapatan dari usaha rumah tangga, pendapatan lainnya, maupun pendapatan transfer. Pendapatan usaha rumah tangga adalah selisih antara pengeuaran/biaya.

Pemahaman definisi pendapatan selanjutnya dijabarkan Sumarsono (2009: 176) bahwa pendapatan keluarga adalah penghasilan yang berbentuk uang maupun dalam bentuk lain yang dapat diuangkan dari hasil usaha yang dilakukan oleh anggota keluarga. Pendapatan keluarga dapat mempengaruhi partisipasi kerja atau alokasi waktu kerja dari seseorang. Kemudian Surono (2008: 13) menerangkan bahwa pendapatan keluarga pada dasarnya merupakan pendapatan antara istri dan suami (pasangan) peroleh.

Berdasarkan beberapa definisi pendapatan keluarga menurut para ahli di atas, maka dapat dipahami bahwa pendapatan keluarga adalah penghasilan dari hasil kerja seseorang. Pendapatan keluarga tersebut mempengaruhi adanya

kebutuhan ekonomi keluarga tersebut dan seluruh penghasilan yang diperoleh dari semua anggota keluarga yang bekerja.

2.1.1.2. Sumber Pendapatan

Setiap rumah tangga memiliki pendapatan tertentu, suatu rumah tangga memperoleh pendapatan dari tiga sumber yaitu (Case dkk, 2002: 469): (1) Upah dan gaji, (2) Pendapatan dari kekayaan, dan (3) Pemerintah.

(1) Upah dan gaji memiliki perbedaan pendapatan dalam upah dan gaji di antara rumah tangga timbul dari perbedaan ciri-ciri para pekerja (keerampilan, pelatihan, pendidikan, pengalaman dan seterusnya) dan perbedaan pekerjaan (berbahaya, sulit, gemerlapan dan seterusnya). Pendapatan rumah tangga juga berbeda menurut jumlah anggota rumah tangga dalam angkatan kerja. Semakin banyak anggota rumah tangga yang bekerja semakin besar juga tingkat pendapatannya.

(2) Pendapatan dari kekayaan, jumlah pendapatan dari kekayaan yang diperoleh sebuah rumah tangga tergantung pada berapa banyak harta milik yang dimilikinya dan jenis aset yang dimilikinya pendapatan semacam ini lazimnya berbentuk laba, bunga, deviden dan sewa.

(3) Pemerintah, dalam bentuk pembayaran tunjangan yaitu pembayaran oleh pemerintah kepada orang yang tidak menawarkan barang maupun jasa sebagai penukarnya. Pembayaran tunjangan itu dilakukan kepada orang yang pendapatannya rendah, semata-mata karena mereka mempunyai pendapatan yang rendah. Dengan demikian pembayaran tunjangan mengurangi jumlah ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan.

Klasifikasi pendapatan menurut Winardi dalam Yuyun (2006: 17) dibedakan menjadi: (1) Pendapatan pokok, (2) Pendapatan sampingan, dan (3) Pendapatan lain – lain. Adapun definisinya sebagai berikut:

(1) Pendapatan Pokok, merupakan pendapatan berupa upah atau gaji berbentuk uang yang diterima dari pekerjaan pokok atau utama.

(2) Pendapatan Sampingan, merupakan pendapatan yang berupa upah atau gaji dari pekerjaan tambahan.

(3) Pendapatan Lain- lain, adalah pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain baik berupa barang maupun berupa uang, pendapatan bukan dari usaha.

Sejalan pendapat di atas, Sumardi dalam Yerikho (2007) mengemukakan bahwa pendapatan yang diterima oleh penduduk akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimilikinya. Dengan pendidikan yang tinggi mereka akan dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik disertai pendapatan yang lebih besar. Sedangkan bagi penduduk yang berpendidikan rendah akan mendapat pekerjaan dengan pendapatan yang kecil. Sumber pendapatan rumah tangga digolongkan ke dalam dua sektor, yaitu sektor pertanian dan non pertanian.

Sumber pendapatan dari sektor pertanian dapat dirincikan lagi menjadi pendapatan dari usaha tani, ternak, buruh petani, menyewakan lahan dan bagi hasil. Sumber pendapatan dari sektor non pertanian dibedakan menjadi pendapatan dari industri rumah tangga, perdagangan, pegawai, jasa, buruh

non pertanian serta buruh subsektor pertanian lainnya (Sajogyo dalam Andy, 2013)

Kemudian BPS (2014: 54), menjabarkan sumber pendapatan adalah yang berasal dari bekerja sebagai buruh/karyawan, dari usaha di sektor pertanian, usaha di luar sektor pertanian dan dari pendapatan karena faktor kepemilikan dan transfer (sebagai penerima pendapatan) serta pendapatan lainnya di luar jenis pendapatan yang telah disebutkan. Sumber pendapatan utama adalah sumber pendapatan terbesar dari seluruh jenis pendapatan rumah tangga tersebut sumber pendapatan dan status pekerjaan.

Pendapatan terdiri dari pendapatan berupa uang, berupa barang, dan penerimaan yang bukan pendapatan. Adapun dijabarkan sebagai berikut:

(1)Pendapatan berupa uang, yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi. Sumber-sumber pendapatannya adalah: (a) gaji dan upah yang diperoleh dari: (1) Kerja pokok, (2) Kerja sampingan, (3) Kerja lembur, dan (4) Kerja kadang-kadang, (b) Usaha sendiri yang meliputi: (1) Hasil bersih dari usaha sendiri, (2) Komisi, dan (3) Penjualan dari kerajinan rumah, (c) Hasil investasi, yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik tanah, (d) Keuntungan sosial, yakni pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial.

(2)Pendapatan berupa barang, yaitu segala penghasilan yang sifatnya regular dan biasa akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dan diterimakan dalam bentuk barang atau jasa. Pendapatan berupa barang yaitu pendapatan berupa: (a) bagian pembayaran upah dan gaji yang dibentukan

dalam: (1) Beras, (2) Pengobatan, (3) Transportasi, (4) Perumahan, dan (5) Rekreasi. (b) Barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah antara lain: Pemakaian barang yang diproduksi di rumah dan Sewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang ditempati.

(3)Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu penerimaan yang berupa: (1) Pengambilan tabungan, (2) Penjualan barang - barang yang dipakai, (3) Penagihan piutang, (4) Pinjaman uang, (5) Kiriman uang, (6) Hadiah/pemberian, (7) Warisan, dan (8) Menang Judi.

Pendapatan yang diperoleh suatu keluarga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik moral maupun material, baik kebutuhan penting maupun tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar yaitu kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup. Terdiri dari kebutuhan atau konsumsi individu (makan, perumahan, pakaian) maupun keperluan pelayanan sosial tertentu (air minum, sanitasi, transportasi, kesehatan dan pendidikan) (Sumarsono, 2009: 177).

Dengan demikian, dari beberapa sumber pendapatan menurut para ahli bahwa sumber pendapatan ialah upah/gaji, hasil/usaha sendiri, dan hasil investasi para pekerja yang bekerja dalam bidang-bidang tertentu dan menghasilkan pendapatan berupa uang maupun berupa barang yang dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar untuk keangsuran hidup.

2.1.1.3. Pengukuran Pendapatan

Berdasarkan penggolongannya, BPS dalam Zulfikar (2010: 28) membedakan pendapatan menjadi 4 golongan adalah:

1. Golongan pendapatan sangat tinggi, adalah jika pendapatan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000,00 per bulan.
2. Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. 2.500.000,00 – s/d Rp. 3.500.000,00 per bulan.
3. Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. 1.500.000 s/d Rp. 2.500.000,00 per bulan.
4. Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata dibawah Rp 1.500.000,00 per bulan.

Kemudian Rianto Adi (2004: 40) mengungkapkan tingkat ekonomi dapat digolongkan menjadi empat kategori, yaitu:

Tabel 2.1. Tingkat Pendapatan

Tingkat Pendapatan			
Pendapatan	Rendah	Rendah	Dibawah Rp. 1.000.000
		Menengah	Rp. 1.000.000- Rp. 1.990.000
		Tinggi	Rp. 2.000.000- Rp. 2.990.000
	Menengah	Rendah	Rp. 3.000.000 - Rp. 3.990.000
		Menengah	Rp. 4.000.000 - Rp. 4.990.000
		Tinggi	Rp. 5.000.000 - Rp. 5.990.000
	Tinggi	Rendah	Rp. 6.000.000 - Rp. 6.990.000
		Menengah	Rp. 7.000.000 - Rp. 7.990.000
		Tinggi	Rp. 8.000.000 ke atas

Berdasarkan beberapa pengukuran pendapatan yang telah dijabarkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengukuran pendapatan dapat diukur dari tingkat ekonomi pendapatan mulai dari golongan rendah, menengah, sampai tinggi.

2.1.2. Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

2.1.2.1. Definisi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah himpunan dari keluarga yang tergolong miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri. Saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama (Asnandar, 2012: 5)

KUBE merupakan salah satu media pemberdayaan yang diciptakan untuk membangun kemampuan warga masyarakat/ keluarga miskin dalam memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, dan mengembangkan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Dimensi sosial dan ekonomi menjadi pilar inti dari kegiatan KUBE. Secara sosial, KUBE menjadi wadah bergabungnya masyarakat/ keluarga miskin, sehingga memungkinkan mereka melakukan interaksi sosial yang positif dan demokratis. Melalui KUBE warga masyarakat/ keluarga miskin, dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi menyelesaikan masalah-masalah personal dan kelompok secara imbal-balik (*mutual support*), yang pada akhirnya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan mereka. Secara ekonomi, kegiatan usaha yang dilakukan dalam kelompok, memberi kekuatan modal, kemampuan bersaing, membangun jejaring, membuka peluang mengakses

sumber-sumber dan menciptakan kegiatan ekonomi produktif yang demokratis (Laras, 2014: 5)

Sejalan dengan pendapat diatas, Asnandar (2012: 17) mendefinisikan bahwa KUBE merupakan media pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk terciptanya, aktifitas sosial ekonomi keluarga fakir miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Melalui kelompok dapat berinteraksi, saling tolong menolong dalam memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan. Kemudian Sumodiningrat (2009: 8) mengemukakan bahwa KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dan keseluruhan proses pemberdayaan masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas mengenai KUBE dapat disimpulkan bahwa KUBE adalah kelompok usaha binaan Kementerian Sosial yang dibentuk dari beberapa Keluarga Binaan Sosial (KBS) untuk melaksanakan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dalam rangka kemandirian usaha meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

2.1.2.2. Sejarah Singkat KUBE

Sejak tahun 1970-an pemerintah menggulirkan program penanggulangan kemiskinan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) khususnya Repelita I-IV melalui program sektor dan regional. Keberadaan lembaga koordinasi penanggulangan kemiskinan yang bersifat sektoral seperti KUBE dari Kementerian Sosial (Dewi dalam Dawiyah, 2011: 22). Sejak tahun 1983 Kementerian Sosial Republik Indonesia menetapkan kebijakan Penanganan Kemiskinan melalui pendekatan

Kelompok, dikenal dengan KUBE. Pada masa terjadinya krisis ekonomi tahun 1997, Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan melalui Program Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK). Sesuai dengan perubahan nama Departemen Sosial Republik Indonesia menjadi Kementerian Sosial Republik Indonesia maka KUBE masih menjadi *icon* (Roebiyantho 2011: 44-45)

Kementerian Sosial dalam menyelenggarakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin menetapkan kebijakan antara lain: (1) Peningkatan Akses Fakir Miskin terhadap sumber daya sosial ekonomi, (2) Peningkatan Prakasa dan peran aktif warga masyarakat dalam pemberdayaan fakir miskin, dan (3) Perlindungan hak-hak dasar Fakir miskin, Peningkatan kualitas manajemen pemberdayaan kemiskinan.

2.1.2.3. Tujuan dan Sasaran Program KUBE

Program KUBE sebagai program yang diselenggarakan Pemerintah memiliki beberapa tujuan yakni sebagai berikut (Laras, 2012: 7):

- (1) Meningkatkan kemampuan keluarga fakir miskin dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi.
- (2) Meningkatkan kemampuan keluarga fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang mencakup; makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar yang layak.
- (3) Meningkatkan kemampuan keluarga fakir miskin melaksanakan peran sosial di dalam keluarga dan masyarakat.

- (4) Meningkatkan kesempatan bagi keluarga fakir miskin untuk mengembangkan potensi diri dalam bidang usaha ekonomi, pendidikan, dan organisasi sosial
- (5) Meningkatkan akses terhadap sumber daya yang ada mengatasi permasalahan, memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kemampuan melaksanakan peran sosialnya.

Adapun Roebiyantho (2011: 7) mengungkapkan tujuan KUBE adalah mempercepat penghapusan kemiskinan, melalui: (1) Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok; (2) Peningkatan pendapatan; (3) Pengembangan usaha; (4) Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar. Sedangkan menurut Euis Sunarti (2006: 31) program KUBE bertujuan untuk: meningkatkan motivasi agar lebih maju, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, megembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait.

Sasaran program KUBE adalah keluarga miskin produktif (orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak lagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan). Keluarga miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan

kesejahteraannya atau mengalami penghentian penghasilan (Tulung, 2011: 39).

Adapun Asnandar (2012) menyatakan bahwa sasaran program KUBE adalah: (1) Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar, (2) Berkembangnya usaha kelompok, (3) Mewujudkan kemandirian usaha sosial ekonomi keluarga miskin, dan (4) Meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial.

Berdasarkan beberapa uraian di atas cukup menjelaskan tujuan dan sasaran dari program KUBE. Program KUBE merupakan program yang bertujuan untuk mensejahterakan keluarga yang tergolong miskin khususnya dalam bidang ekonomi keluarga dan meningkatkan taraf hidup keluarga yang lebih baik serta memiliki sasaran yang sesuai dengan pemenuhan dasar diselenggarakannya KUBE.

2.1.2.4. Aspek dan Dimensi Ekonomi dalam KUBE

KUBE yang ditumbuhkan dan atau berkembang, meliputi beberapa aspek sebagai berikut (Asnandar, 2012: 18): (1) Pengelolaan UEP sehingga dapat berhasil dan meningkatkan kesejahteraan para anggota KUBE, (2) Adanya penggalan sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan kesejahteraan anggota KUBE, (3) Memiliki inisiatif membentuk embrio LKM/Koperasi, dan (4) Membangun kerjasama dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak yang dapat mempercepat keberhasilan KUBE.

Di sisi lain Laras (2012: 15), menjabarkan beberapa aspek sebagai berikut:

- 1) Mengelola dan mengembangkan UEP sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan dan pendidikan keluarga.
- 2) Jenis UEP dalam satu kelompok dapat bermacam-macam/bervariasi tergantung peluang pasar, potensi local dan keterampilan yang dimiliki masing-masing anggota KUBE.
- 3) Menggali sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan kesejahteraan anggota KUBE.
- 4) Melakukan pembaharuan atau inovasi teknik/ cara pengelolaan usaha untuk meningkatkan mutu dan jumlah produk KUBE. Kegiatan ini diantaranya dapat dilakukan dengan menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Selain itu, dapat diketahui beberapa dimensi ekonomi dalam KUBE (Laras, 2014 : 25-27) terbagi dalam: (1) Ekonomi dalam KUBE dan (2) Ekonomi individu.

Pertama ekonomi dalam KUBE, dari hasil menjalankan usaha, KUBE memiliki aset berupa segala sesuatu dalam bentuk uang dan/ barang yang dapat dinilai dengan uang. Aset KUBE, sebagai kekayaan kelompok dari waktu ke waktu bertambah. Sekecil atau sebesar apapun pertambahan aset, harus dicatatkan dan diamankan serta dimanfaatkan sebagai milik bersama anggota KUBE.

Kedua ekonomi individu yang terdiri dari: (a) Penghasilan, aset KUBE, juga memiliki dampak terhadap penambahan penghasilan anggota-anggota KUBE. Dalam KUBE, dicatat bagaimana perkembangan penghasilan masing-masing anggotanya. Dapat dilihat bagaimana perbandingan penghasilan dari awal anggota bergabung di dalam KUBE hingga masa aktifnya selama di KUBE dan (b) Kepemilikan, anggota-anggota KUBE, disamping memiliki aset bersama juga secara individu (anggota KUBE dan keluarganya) memperoleh aset pula. Aset anggota KUBE dan keluarganya dapat bertambah (atau berkurang) selama kepersertaannya dalam KUBE. Aset tersebut berupa segala sesuatu (barang, tabungan, peralatan, perhiasan, dan lain-lain) yang diperoleh dari hasil pengelolaan KUBE yang dapat dinilai dengan uang, selama periode waktu tertentu (beberapa lama).

Dengan demikian dapat disintesis bahwa aspek dan dimensi ekonomi dalam KUBE menunjukkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu dapat meningkatkan mutu dan jumlah produk KUBE serta dapat meningkatkan ekonomi dalam KUBE maupun individu/anggota KUBE.

2.1.2.5. Indikator Program KUBE

Beberapa indikator program KUBE untuk mencapai keberhasilan KUBE, Asnandar (2014: 20) menjabarkan indikator program KUBE sebagai berikut :

1) Meningkatnya taraf kesejahteraan keluarga masyarakat miskin meliputi: (a) meningkatnya penghasilan keluarga, (b) terpeliharanya penghasilan keluarga secara berkesinambungan, dan (c) meningkatnya tabungan keluarga.

2) Mewujudkan kemandirian usaha ekonomi keluarga masyarakat miskin meliputi: (a) terbentuknya kelompok usaha ekonomi yang terorganisir dengan baik, (b) meningkatnya produktivitas dan kemandirian usaha, (c) terbentuknya lembaga-lembaga keuangan mikro yang mandiri, dan (d) meningkat dan melembaganya usaha-usaha kesejahteraan sosial.

3) Meningkatkan aksesibilitas keluarga masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan sistem jaminan sosial kesejahteraan sosial meliputi: (a) meningkatnya akses masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan sosial dasar (rumah layak huni dan sehat, lapangan kerja, pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan kebutuhan dasar lainnya) dan (b) Meningkatnya kepersertaan dalam jaminan kesejahteraan sosial (seperti asuransi kesejahteraan sosial).

4) Peningkatan jumlah aset individual masyarakat miskin anggota KUBE meliputi: (a) terbentuknya rekening tabungan individual anggota KUBE, (b) adanya dana yang disimpan sebagai tabungan untuk tujuan memperoleh aset tertentu (pembelian atau rehab rumah, pembelian lahan, pembelian alat atau tempat usaha, tabungan untuk pendidikan anaknya), (c) adanya dana dampingan yang ditransfer langsung dari Kementerian Sosial atau sumber-sumber lain kepada rekening tabungan individual, dan (d)

pemilik tabungan secara rutin menambah jumlah tabungan dan tidak mengambilnya kecuali untuk tujuan yang telah ditetapkan.

5) Meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam program pemberdayaan masyarakat miskin, meliputi: (a) meningkatnya peran aktif Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)/ Organisasi Sosial dalam program pemberdayaan masyarakat miskin, (b) meningkatnya tanggung jawab sosial dunia usaha dalam program pemberdayaan masyarakat miskin, (c) meningkatnya peran aktif perguruan tinggi dalam program pemberdayaan masyarakat miskin, dan (d) meningkatnya kepedulian warga mampu dalam program pemberdayaan masyarakat miskin.

6) Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat dalam memberdayakan masyarakat miskin, meliputi: (a) adanya mekanisme pemberdayaan masyarakat miskin yang berbasis masyarakat setempat, (b) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam organisasi sosial lokal yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat miskin, dan (c) aktualisasi kearifan lokal dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

7) Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial terhadap keluarga masyarakat miskin, meliputi: (a) tertatanya sistem informasi kemiskinan, termasuk tersedianya indikator kinerja dan akuntabilitas program, (b) dimanfaatkannya hasil-hasil penelitian masalah kemiskinan dan pengembangan model penanganannya.

8) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, pekerja sosial local, meliputi: (a) tertatanya peraturan perundangan dalam pemberdayaan

masyarakat miskin dan (b) meningkatnya kerjasama peningkatan kapasitas dan bantuan sosial dalam manajemen program pemberdayaan masyarakat miskin.

2.1.2.6. Prinsip Pelaksanaan Program KUBE

Pelaksanaan KUBE memiliki prinsip pelaksanaan program KUBE yakni (Asnandar, 2012: 9):

1) Amanah, yakni penanggulangan kemiskinan perkotaan dilakukan dengan penuh integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan.

2) Profesional, yakni penanggulangan kemiskinan perkotaan dilakukan dengan sangat kompeten dan bertanggung jawab yang menawarkan jaminan bahwa kepuasan warga masyarakat penerima pelayanan sosial adalah hal yang utama.

3) Produktif, yakni penanggulangan kemiskinan perkotaan dilakukan dengan menyeimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi. Produktivitas juga mengandung makna inovasi, yaitu kemampuan menghasilkan gagasan baru yang layak diterapkan.

4) Akuntabel, berarti bahwa semua unsur yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan perkotaan harus bertanggung gugat atas kualitas juga mengandung makna kejujuran dan amanah dalam mengemban kepercayaan yang diberikan.

5) Transparan, berarti bahwa keputusan yang diambil berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi

tersedia dengan jelas dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang terkena dampak atau yang berkepentingan dengan pelaksanaan keputusan itu.

6) Berbasis masyarakat, yakni penanggulangan kemiskinan perkotaan dilakukan sesuai potensi yang ada di masyarakat.

7) Objektivitas, yakni penanggulangan kemiskinan perkotaan dilakukan dengan bersikap adil dan tidak deskriminatif.

8) Partisipasif, yakni penanggulangan kemiskinan perkotaan dilakukan dengan melibatkan berbagai lapisan dan komponen masyarakat.

9) Keterpaduan, yakni penanggulangan kemiskinan perkotaan dilaksanakan secara sinergis dengan berbagai kegiatan lintas sector yang saling mendukung dan melengkapi.

10) Kemandirian, yakni pengembangan program/ kegiatan diarahkan pada peningkatan kemampuan swakelola dan swadana dalam penanggulangan kemiskinan perkotaan secara sinergis.

11) Kemitraan, yakni penanggulangan kemiskinan perkotaan diselenggarakan dengan cara membangun hubungan kerjasama yang saling menguntungkan baik secara internal maupun eksternal, berkolaborasi dan koordinasi pada tingkat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan para pihak yang terkait.

12) Keberlanjutan, yakni dalam penyelenggaraan program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan perkotaan harus mampu menumbuhkan kesadaran dan semangat para penerima pelayanan sosial untuk senantiasa

memanfaatkan, memelihara, melestarikan, menguatkan dan mengembangkan secara terus menerus hasil yang telah dicapai.

Selain itu, prinsip pengelolaan KUBE dijabarkan sebagai berikut ini (Laras,2012: 17): (1) Penentuan nasib sendiri, (2) kekeluargaan, (3) kegotongroyongan, (4) berbasis potensi lokal.

1) Penentuan nasib sendiri

Anggota KUBE sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, mempunyai hak untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Dalam nilai seperti ini, para supervisor atau pendamping sosial yang terlibat dalam kegiatan KUBE berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan KUBE tersebut.

2) Kekeluargaan

Prinsip ini menekankan bahwa pengembangan KUBE perlu dibangun atas semangat kekeluargaan di antara sesama anggota KUBE dan lingkungannya. Nilai seperti ini akan menumbuhkan suatu semangat dan sikap kerja tanpa pamrih dalam mewujudkan keberhasilan KUBE.

3) Kegotongroyongan

Kegotongroyongan berarti menuntut perlu adanya kebersamaan dan semangat kebersamaan di antara sesama para anggota KUBE. Dalam prinsip tidak menonjolkan adanya perbedaan antara atasan dan bawahan, tetapi lebih mengedepankan kebersamaan di antara sesama KUBE.

4) Berbasis Potensi Lokal

Pengelolaan dan pengembangan KUBE harus didasarkan pada kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh para anggota KUBE, dan

didasarkan pada ketersediaan sumber/ potensi yang ada di daerah tersebut agar tidak menjadi suatu kendala.

Dengan demikian prinsip-prinsip program KUBE yang terjabar oleh beberapa ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip-prinsip program KUBE dikategorikan pada sikap alamiah manusia dengan Tuhan-Nya, manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungan sekitarnya dalam butir-butir prinsip program KUBE yang dijabarkan diatas.

2.1.2.7. Implementasi Pelaksanaan Program KUBE

Sebelum merujuk pada implementasi program, perlu diketahui definisi program. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online: 2016) program didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Kemudian Jones dalam Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Jones (Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

1) Pengorganisasian

Struktur oganisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

2) Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3) Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah “Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu)” (Webster dalam Wahab, 2004:64).

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (1975), dalam bukunya Leo Agustino (2006:139), mendefinisikan implementasi sebagai: “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau

mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disintesis bahwa Implementasi program adalah aktivitas, aksi, tindakan, dan mekanisme suatu sistem yang merupakan proses dinamis dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan itu sendiri.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai implementasi program KUBE, maka perlu dipahami fokus terbentuknya program KUBE. Penanggulangan kemiskinan perkotaan merupakan salah satu upaya strategis nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial melindungi hak asasi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kementerian Sosial Republik Indonesia merupakan lembaga yang berfokus pada program pembangunan bidang kesejahteraan sosial melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk memberdayakan dan menanggulangi kelompok masyarakat miskin melalui program penanggulangan kemiskinan perkotaan dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pemberian bantuan stimulant disalurkan melalui perbankan sebagai penguatan modal kelompok yang sudah mempunyai Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Adapun pemberian

bantuan sebagai penguatan modal usaha untuk memfasilitasi kelompok fakir miskin yang telah diwadahi dalam KUBE untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP) (Laras, 2014: i).

Adapun Laras (2014: 4), mengemukakan beberapa pertimbangan KUBE sebagai media pemberdayaan dalam penganggulangan kemiskinan:

- 1) Dapat dijadikan sarana yang efektif bagi keluarga fakir miskin untuk mengatasi berbagai keterbatasan, seperti: kepemilikan modal, informasi, teknologi dan lainnya secara bersama-sama dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya.
- 2) Dapat dijadikan sarana pembelajaran yang efektif bagi keluarga miskin, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM pada umumnya.
- 3) Dapat menumbuh kembangkan kemampuan berorganisasi, sehingga memungkinkan keluarga fakir miskin mengotimalkan pendayagunaan potensi dan sumber-sumber ekonomi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya secara efektif dan efisien,
- 4) Melalui sistem KUBE, dapat menumbuh kembangkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, kepedulian, dan kesetiakawanan baik di antara keluarga fakir miskin maupun dengan masyarakat luas.
- 5) Melalui sistem KUBE, memudahkan bagi para pihak yang memberdayakan mereka dalam pelaksanaan pembinaan maupun monitoring. Dengan demikian pelaksanaannya akan lebih efektif dan efisien baik dari segi pemberdayaan, tenaga dan waktu yang digunakan.

6) Melalui sistem KUBE, akan meningkatkan tanggung jawab melalui sistem kontrol minimal di antara anggota sehingga menjamin optimalisasi pencapaian hasil, pelestarian dan keberlangsungan program.

KUBE merupakan program pendekatan pemberdayaan fakir miskin dan penanggulangan kemiskikinan. Didalam media pendekatan ini dicakup dimensi ekonomi dan kelembagaan termasuk didalamnya tentang manajemen. Dari aspek ekonomi, pendekatannya dilakukan sejak pemberian paket stimulan untuk usaha/ kerja. Dalam pemberian paket stimulan ini, para fakir miskin penerima manfaat diberikan stimulans sebesar Rp 20.000.000,- setiap kelompok yang terdiri dari 10 KK. Tentang pemilihan jenis usaha/ kerja, diserahkan sepenuhnya kepada kelompok dimaksud dengan bimbingan para pendamping. Pemilihan jenis usaha/ kerja ini tentunya disesuaikan dengan tersedianya bahan dasar dan kondisi pasar setempat. Para pendamping inilah yang kemudian mempunyai peran strategis yakni sebagai fasilitator, penghubung, dinamisator serta motivator para penerima manfaat yang tergabung dalam KUBE (Laras, 2012: 3)

Pendamping membimbing KUBE untuk melakukan usaha/ kerja secara kelompok demi kebersamaan dan hasil capaian bersama. Sedangkan pendekatan kelembagaan, adalah pemberian bimbingan agar para penerima manfaat yang tergabungdalam KUBE dapat terus melakukan kegiatan secara terlembaga, sejak perencanaan, penentuan jenis kerja usaha, pengelolaan KUBE hingga pemanfaatan hasil.

Sejak dilaksanakannya pemberdayaan dengan melalui pendekatan KUBE, dirasakan sudah mendapatkan peningkatan kesejahteraan warga

binaan. Namun demikian, khusus untuk keluarga miskin di wilayah perkotaan masih perlu ditingkatkan lebih lanjut baik secara kualitas dan kuantitasnya, mengingat perkotaan sebagai lokasi yang sangat padat, kumuh dan biaya hidup lebih tinggi disamping adanya berbagai peluang usaha yang dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan pendapatan dan usaha. (Asnandar, 2012: 2).

Untuk mengetahui pelaksanaan KUBE maka awal pembentukan dan pengembangan KUBE didasari oleh kedekatan tempat tinggal, jenis usaha atau keterampilan anggota, ketersediaan sumber/keadaan geografis, latar belakang kehidupan budaya, memiliki motivasi yang sama, keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah tumbuh berkembang lama. Melalui program KUBE, kelompok dapat berinteraksi, saling tolong menolong dalam memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan (Asnandar, 2012: 17).

Adapun Asnandar (2012: 24) mengungkapkan kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program KUBE sebagai berikut:

1) Penjajakan lokasi dan pemetaan kebutuhan

Penjajakan lokasi dan pemetaan kebutuhan ke Kota/Kabupaten bertujuan untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran tentang usulan-usulan proposal yang telah direkomendasikan Dinas Sosial Provinsi. Dalam kesempatan ini dilakukan juga kunjungan langsung ke lokasi KUBE untuk mengetahui gambaran kegiatan aktivitas UEP. Hasil penjajakan dan pemetaan kebutuhan ini

sebagai upaya memastikan bahwa usulan program layak untuk dilaksanakan di Kota/Kabupaten yang bersangkutan.

2) Sosialisasi

Sosialisasi program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan program penanggulangan kemiskinan perkotaan dan membangun kesamaan persepsi terhadap proses dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan. Melalui sosialisasi ini dapat juga membangun kerjasama antar berbagai pihak yang terkait serta mendapatkan umpan balik terhadap rencana kegiatan. Pertemuan sosialisasi dilaksanakan dan difasilitasi oleh Kementerian Sosial dan bekerja sama dengan Dinas/Instansi sosial daerah dengan menghadirkan Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kota/Kabupaten yang mendapat program, Bappeda, Dinas teknis yang terkait.

3) Penyerahan Bantuan

Setelah semua data dan persyaratan KUBE, Pendamping sudah lengkap (penetapan KUBE, Pendamping, rekening), maka dilanjutkan penyaluran dana stimulan UEP kepada KUBE melalui transfer ke masing-masing rekening. Besarnya bantuan tiap kelompok bisa berbeda-beda berdasarkan jumlah anggotanya (5-10 KK), dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000,- sampai Rp. 20.000.000,-.

4) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan sepenuhnya dibantu oleh Dinas/Instansi sosial daerah. Kegiatan monitoring ini ditujukan agar proses pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, Laras (2014:19) mengemukakan pelaksanaan program KUBE adalah sebagai berikut: (1) Seleksi calon KUBE, (2) Pembentukan pra-kelompok dan kelompok, (3) Penentuan jenis usaha, (4) Pelatihan pendamping KUBE, (5) Pelatihan keterampilan anggota KUBE, (6) Pemberian jaminan hidup, (7) Bantuan stimulasi permodalan, (8) Pendampingan, dan (9) Evaluasi (Oleh: aparat desa/kelurahan, pendamping, Pembina fungsional, instansi terkait)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi program KUBE menyangkut tiga hal, yaitu: (1) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan program KUBE, (2) Adanya aktivitas/kegiatan pencapaian tujuan program KUBE, dan (3) Adanya hasil kegiatan program KUBE.

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Terdapat penelitian yang relevan sesuai dengan penelitian ini dalam melakukan penelitian mengenai analisis dampak implementasi program KUBE terhadap pendapatan keluarga, yakni:

- 1) Penelitian yang disusun oleh Mutiara Pertiwi (2008), dengan judul **“Analisis Efektivitas Kelompok Usaha Bersama Sebagai Program Pemberdayaan Rakyat Miskin Perkotaan”**. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta. Penelitian tersebut bertujuan untuk penelitian ini adalah mendeskripsikan kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Pesanggrahan, menganalisis efektivitas KUBE dalam program penganggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh Pemerintah di

Kecamatan Pesanggrahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan KUBE, merumuskan implikasi kebijakan atas pelaksanaan KUBE dalam program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan. Metode penelitian yang digunakan adalah *accidental sampling*. Untuk itu penelitian dilakukan dengan menggunakan uji beda mean dua sampel berpasangan, yaitu menganalisis selisih antara pendapatan sebelum dan setelah bergabung dengan KUBE. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji beda mean dua sampel berpasangan menghasilkan t-hitung sebesar 4,48 untuk RT miskin, 4,7 untuk RT tidak miskin dan 6,1 untuk keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa t-hitung lebih besar dari t-tabel yang digunakan sehingga dapat disimpulkan bahwa program KUBE secara kuantitatif efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

- 2) Penelitian yang disusun oleh Siti Dawiyah (2011), dengan judul **“Evaluasi Dampak Usaha Konveksi Kelompok Usaha Bersama Teluk Amanah Pada Peningkatan Aset Anggotanya”**. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Melayu, Kabupaten Tangerang. Untuk itu penelitian memfokuskan pada peningkatan asset anggota dan seberapa jauh program KUBE berdampak bagi anggotanya. Penelitian ini menggunakan analisis evaluasi, dampak program pada asset anggotanya. Dari hasil penelitian ini maka diperoleh data bahwa, dampak aset yang dirasakan dan dimiliki anggota KUBE menjadi dua kategori yaitu aset yang nyata dan aset tidak nyata sebelum dan setelah anggota mengikuti program KUBE. Pada kedua aset nyata dan tidak nyata memiliki hasil yang berbeda saat anggota sebelum menjadi anggota, anggota tidak memiliki beberapa aset nyata dan

setelah anggota menjadi anggota-anggota memiliki aset nyata seperti furniture, alat elektronik dan modal sosial. Dampak untuk jangka panjang anggota KUBE pada aset yaitu tidak lagi menganggur atau memiliki pekerjaan, dalam hal ini dapat dilihat dari penurunan pengangguran di Kampung Melayu tahun 2008 mencapai 8,39%, pengangguran terus menurun hingga tahun 2010 sebesar 7,14%.

- 3) Penelitian yang disusun oleh Tuty Movrenta (2008), dengan judul “**Implementasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tani**”. Penelitian ini dilakukan di Dusun III, Desa Pematang Lalang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh KUBE tani serta kendala yang dihadapi oleh kelompok tani dalam meningkatkan hasil produksi panennya guna memperbaiki kualitas hidup KUBE tani. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode analisa deskriptif. Dimana, teknik sampling yang digunakan adalah *sampling purposive*. Kemudian hasil data melalui penyebaran kuesioner dituangkan kedalam bentuk tabel frekuensi dan kemudian dianalisa kembali untuk mendapatkan gambaran atau kesimpulan yang lebih jelas mengenai obyek yang diteliti. Secara umum, Implementasi Program KUBE Tani belum berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan program ini belum sepenuhnya mampu untuk memperbaiki kesejahteraan kelompok tani khususnya, dan petani lainnya pada umumnya.

2.3. Kerangka Teoritik

Berbagai permasalahan pada ekonomi keluarga khususnya dalam tingkat pendapatan keluarga maka dilakukan upaya oleh Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan keluarga yang tergolong miskin. Kementerian Sosial dalam mengentaskan keluarga miskin perkotaan melakukan pendekatan Program KUBE. Dengan dibentuknya program KUBE diharapkan memberikan dampak positif bagi keluarga miskin dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Anggota keluarga yang mengikuti program KUBE dapat mengembangkan bakatnya dalam jenis bidang usaha serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Maka dari itu mengukur tingkat pendapatan keluarga dapat dilihat dari daya kreativitas bagi para anggota dalam menggeluti usahanya di KUBE, bekerjasama dalam mengembangkan usaha, serta melakukan beberapa inovasi usaha agar membuat menarik konsumen dalam melihat kualitas usaha dan sumber daya manusia di dalam KUBE.

Menentukan jenis usaha adalah langkah awal untuk menentukan keberhasilan proses KUBE. Maka usaha yang akan dikembangkan dalam KUBE harus sejalan dengan kemampuan para anggota KUBE dalam bekerja. Usaha akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan KUBE dan tingkat pendapatan anggota KUBE sebelum dan sesudah bekerja di KUBE. Akhirnya memberikan dampak implementasi KUBE dalam meningkatkan pendapatan keluarga anggota KUBE.

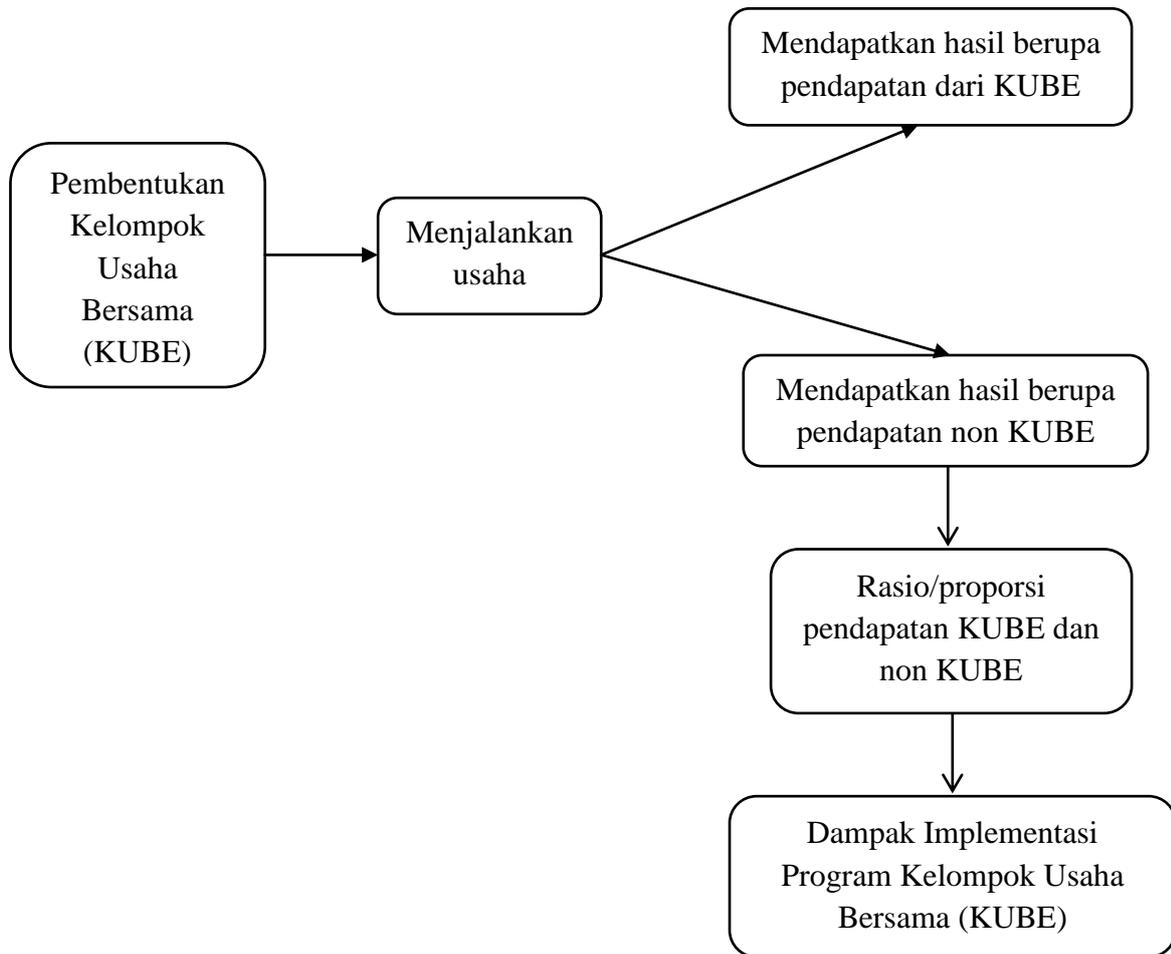
Pendapatan merupakan penghasilan yang memberikan pengaruh bagi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam hal ini pendapatan di keluarga akan

menentukan tingkat ekonomi keluarga. Semakin tinggi pendapatan keluarga maka kebutuhan untuk pengeluaran konsumsi keluarga terpenuhi. Namun sebaliknya, jika semakin rendah pendapatan keluarga maka kebutuhan untuk pengeluaran konsumsi keluarga tidak terpenuhi yang menyebabkan tidak teraturnya tingkat pendapatan keluarga.

Hasil pendapatan tersebut berupa hasil yang diperoleh KUBE atau non KUBE. Hasil pendapatan tersebut akan menentukan berapa rasio proporsi pendapatan yang diperoleh. Pendapatan akan memberikan dampak baik atau tidak bagi anggota keluarga yang bekerja di KUBE.

Program KUBE ini akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan keluarga bagi anggota yang sebelum dan selama bekerja di KUBE. Maka terjadi dampak implementasi program KUBE dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

Berdasarkan pemahaman tersebut dapat disintesis bahwa dengan pembentukan program KUBE yang diadakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dapat memberikan dampak implementasi program KUBE tersebut terhadap tingkat pendapatan keluarga yang bekerja di KUBE.



Gambar 2.2. Kerangka Teoritik

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan dari pengertian dan kerangka teoretik sebagaimana telah diuraikan di atas serta permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh pada dampak implementasi program kelompok usaha bersama (KUBE) terhadap tingkat pendapatan keluarga.

H₀: Tidak terdapat pengaruh pada dampak implementasi program kelompok usaha bersama (KUBE) terhadap tingkat pendapatan keluarga.